

**PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENGELOLAAN PERTANIAN PERKOTAAN
(*URBAN FARMING*) DI KELURAHAN SAMPANGAN, KOTA SEMARANG**

Anindita Ghina Pramudita, Amni Zarkasyi Rahman, & Retna Hanani

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jln. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Ketahanan Pangan yang merupakan strategi *Sustainable Development Goals* (SDG'S) dapat diwujudkan melalui *urban farming* atau pertanian perkotaan. Upaya pengelolaan *urban farming* di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang. Peraturan tersebut menjadi pedoman *stakeholders* dalam menjalankan perannya dalam pengelolaan *urban farming* di Kota Semarang termasuk di Kelurahan Sampangan yang melibatkan berbagai *stakeholders*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *stakeholders* dan faktor pendukung dan faktor penghambat peran *stakeholders* dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap *stakeholders* mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan yang terdiri dari *stakeholders* pemerintah (Dinas Pertanian Kota Semarang dan Kelurahan Sampangan), bisnis (PT. Bank BRI Regional Office Kota Semarang), masyarakat (KWT Puspitasari, PKK RW 03 Kelurahan Sampangan, RW 03 Kelurahan Sampangan), akademisi (Universitas Negeri Semarang), dan media massa (Jawapos Radar Semarang). Peran *stakeholders* dalam penelitian ini terdiri dari: *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih ditemukan peran antar *stakeholders* yang belum optimal sehingga menghambat pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan. Saran dari penelitian ini adalah *stakeholders* meningkatkan komunikasi agar tidak terjadi kesalahan penafsiran informasi, menambah jumlah tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan, mengajak dan merangkul wanita usia muda, meningkatkan kerja sama dengan media massa, serta mengoptimalkan pemenuhan fasilitas *urban farming*.

Kata Kunci: *Stakeholders*, Peran, Pengelolaan *Urban Farming*

ABSTRACT

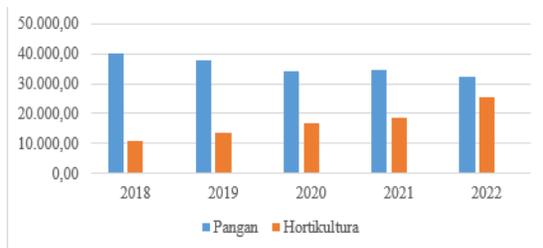
Food security, which is a Sustainable Development Goals (SDG'S) strategy, can be realized through urban farming. Efforts to manage urban farming in Semarang City are based on Semarang Mayor Regulation Number 24 of 2021 concerning the Urban Agricultural Cultivation Movement in Semarang City. This regulation serves as a guide for stakeholders in carrying out their role in managing urban farming in Semarang City, including in Sampangan Village, which involves various stakeholders. This research aims to analyze the role of stakeholders and the supporting and inhibiting factors for the role of stakeholders in managing urban farming in Sampangan Village, Semarang City. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the research show that each stakeholder has duties and functions in managing urban farming in Sampangan Village, consisting of government stakeholders (Semarang City Agricultural Service and Sampangan Village), business (PT. Bank BRI Regional Office Semarang City), community (KWT Puspitasari, PKK RW 03 Sampangan Village, RW 03 Sampangan Village), academics (Semarang State University), and mass media (Jawapos Radar Semarang). The roles of stakeholders in this research consist of: policy creator, coordinator, facilitator, implementor, and accelerator. The conclusion of this research is that the role of stakeholders is still not optimal, thus hampering the management of urban farming in Sampangan Village. The suggestions from this research are for stakeholders to improve communication to avoid misinterpretation of information, increase the number of sub-district field agricultural extension workers, invite and embrace young women, increase cooperation with mass media, and optimize the provision of urban farming facilities.

Keywords: *Stakeholders, Roles, Management of Urban Farming*

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Kota Semarang yang bertambah setiap tahunnya membutuhkan konsumsi pangan yang semakin besar, sedangkan di sisi lain terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Menurut RPJMD Perubahan Kota Semarang Tahun 2016-2021 menyebutkan lahan terbangun di kota Semarang bertambah hingga 742,5 Ha/tahun.

Tabel 1.1 Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Semarang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pertanian Kota Semarang (2022)

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui jumlah produksi tanaman pangan mengalami penurunan Pada tahun 2021 produksi tanaman pangan sebesar 34.417,30 ton kemudian tahun 2022 menurun menjadi 32.237,84 ton atau minus 6,33%. Jumlah produksi tanaman pangan juga tidak mencapai target kinerja program, yang hasil produksi sebesar 34.417,30 ton, sedangkan target kinerjanya adalah 45.276 ton sehingga terdapat ketidaktercapaian 10.858,7 ton.

Kondisi pertanian tersebut membuat Pemerintah Kota Semarang melaksanakan pertanian perkotaan

(*urban farming*). *Urban Farming* sebagai penggunaan ruang terbuka yang tidak produktif menjadi lahan pertanian yang produktif agar menjadi aktivitas alternatif masyarakat perkotaan (Luthan, 2019).

Pengelolaan *urban farming* di Kota Semarang masih mengalami masalah, seperti keanggotaan kelompok tani. Minat masyarakat untuk bergabung kelompok tani perkotaan yang mendukung pelaksanaan *urban farming* masih rendah. Keadaan tersebut didukung dengan pernyataan berikut ini.

“Kami mencoba mendorong masyarakat agar terbentuk kelompok pertanian perkotaan, tetapi minat masih rendah dan belum fokus, sehingga kader yang dibina ternyata sama dengan kader kesehatan atau kader KB” (Times Indonesia.id. 14/05/2020) Diakses pada Selasa 02/01/2023.

Peran *stakeholders* dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan masih mengalami permasalahan. Pertama, kurangnya partisipasi wanita usia muda dalam keanggotaan KWT Puspitasari Kelurahan Sampangan. KWT Puspitasari yang melakukan proses *urban farming* di Kelurahan Sampangan didominasi oleh wanita usia lanjut. Kurangnya partisipasi wanita usia muda memberikan masalah dalam keberlanjutan.

“Karena telah terbentuk, jadi harus terus dilanjutkan. Kalau bisa terdapat regenerasi, sehingga dapat bertahan” (Radar Semarang. 02/02/2023) Diakses pada Kamis 02/03/2023.

Kedua, berdasarkan observasi awal pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan menurut Penyuluh Pertanian Lapangan Gajahmungkur terjadi masalah koordinasi tugas pelaksanaan *urban farming* dengan KWT Puspitasari sehingga terjadi perbedaan pemahaman dan tindakan dalam melaksanakan *urban farming*.

Ketiga, belum optimalnya peran penyuluh pertanian perkotaan sebagai motivator dalam menumbuhkan semangat dan dorongan wanita usia muda Kelurahan Sampangan untuk melaksanakan *urban farming*, yang dilihat dari kurangnya partisipasi wanita usia muda pada pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan. Kondisi tersebut didukung dari penelitian terdahulu Yestisia Inne (2021) yang menyatakan bahwa peran PPL sebagai motivator paling rendah hanya sebesar 59,56%.

Keempat, belum tercapainya target kerja Dinas Pertanian Kota Semarang dalam memberikan kegiatan penyuluhan dan pelatihan pertanian perkotaan. Penyuluhan dan pelatihan pertanian perkotaan melalui *urban farming corner* dilihat dari realisasi pelatihan *urban farming* 2021 hanya mencapai 14 kali, dari target sebesar 24 kali pelatihan (Dinas Pertanian Kota Semarang, 2022).

Kelima, kurangnya sinergitas

Dinas Pertanian Kota Semarang dan Penyuluh Pertanian Lapangan dengan komunitas dan masyarakat dalam mengelola *urban farming*. Permasalahan dalam pelaksanaan *urban farming* di Kota Semarang berdasarkan LKJIP Dinas Pertanian Kota Semarang adalah produksi *urban farming* yang belum menekankan pada produksi usaha hasil panen, yang mana masih memfokuskan pada skala pemenuhan kebutuhan pangan individual dan keluarga (Dinas Pertanian Kota Semarang, 2022).

Keenam, kurang variatifnya pelatihan yang diberikan oleh akademisi dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan. UNNES melalui kegiatan pengabdian masyarakat memberikan pelatihan pembuatan pupuk untuk mendukung pengelolaan *urban farming*. Pelatihan yang diberikan oleh akademisi sebatas pada pelatihan pembuatan pupuk, yang mana belum terdapat pelatihan dalam pemanfaatan benih tanaman dari lingkungan sekitar masyarakat. Masyarakat masih bergantung pada pemberian bibit dari Dinas Pertanian. Kondisi tersebut didukung dari pernyataan berikut ini.

“Permintaan benih sangat luar biasa. Setiap hari ada yang minta. Ini baru pengenalan. Jadi, mereka mulai dari nol” (Rmol Jateng. 08/03/2023) Diakses pada Rabu 15/03/2023.

Ketujuh, kurangnya keterlibatan

pihak bisnis atau privat pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan. Pihak bisnis yang terlibat dalam pengelolaan *urban farming* hanya PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Regional Office Semarang melalui CSR.

Kedelapan, media massa belum memberikan informasi kegiatan *urban farming* secara rutin dan belum mempublikasikan terkait penjualan hasil panen *urban farming* di Kelurahan Sampangan. Kondisi tersebut didukung dari pernyataan berikut ini.

“Sejauh ini pemasaran produk baru dilakukan kepada tetangga sekitar dengan harga jual sayuran dibawah rata-rata harga penjualan sayuran hidroponik”
(Kompasiana.id. 28/12/2021)
Diakses pada Kamis 16/03/2023.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholders* dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menjelaskan peran *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota

Semarang.

2. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholders* dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang.

KERANGKA TEORI

Peran

Menurut Jim Ife (2008) terdapat beberapa indikator peran yang perlu dimiliki oleh individu atau kelompok agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran tersebut antara lain:

1. Peran Fasilitatif.

Peran dalam memberikan fasilitasi, menguatkan, serta mengapresiasi kontribusi atau kerja yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau masyarakat.

2. Peran Edukasi.

Peran dalam memberikan masukan untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, dan pengalaman untuk individu, kelompok, serta masyarakat.

3. Peran Representasional.

Peran dengan melakukan interaksi dengan pihak luar demi kepentingan individu, kelompok, serta masyarakat.

4. Peran Teknis.

Peran berkaitan dengan kemampuan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti peran pengumpulan dan analisis

data, kemampuan menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan, kemampuan teknis dalam melaksanakan kegiatan.

Peran Stakeholders

Peran masing-masing *stakeholders* dalam menjalankan tugas dan fungsi menurut Riant Nugroho (2014) mengelompokkan *stakeholders* berdasarkan peranannya, antara lain:

1. *Policy Creator*

Peran *policy creator* merupakan peran dalam mengambil sebuah keputusan, dan menentukan sebuah kebijakan atau program.

2. Koordinator

Peran koordinator merupakan peran untuk mengkoordinasikan antara *stakeholder* satu dengan *stakeholder* lain yang terlibat dalam sebuah kebijakan.

3. Fasilitator

Peran fasilitator adalah individu atau kelompok yang berperan untuk memberikan fasilitasi dan memenuhi apa yang dibutuhkan dari kelompok sasaran pada program tersebut.

4. Implementor

Peran implementor adalah individu atau kelompok yang mempunyai peran melaksanakan kebijakan atau program, yang didalamnya juga mencakup

kelompok sasaran.

5. Akselerator

Peran akselerator merupakan individu atau kelompok yang mempunyai peran untuk mempercepat dan berkontribusi supaya sebuah kebijakan atau program dapat terlaksana sesuai tujuan yang telah ditetapkan, atau bahkan tujuan dapat tercapai lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif sebagai penelitian dengan menggambarkan, membuat sebuah catatan, melakukan analisa, dan menginterpretasikan ke dalam situasi saat ini untuk memberikan gambaran mekanisme suatu proses dan membentuk serangkaian pola atau kategori. Data dijelaskan dalam bentuk deskriptif untuk memudahkan peneliti dalam menyajikan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga mendapatkan fakta yang ada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*) di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang

Pada penelitian ini *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan *urban farming*

dijabarkan menurut tugas dan fungsi *stakeholders* dengan informan penelitian diklasifikasikan menurut 1) Pemerintah, 2) Bisnis, 3) Komunitas, 4) Akademisi, 5) Media Massa.

1) **Pemerintah (Government)**

Stakeholder pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan yaitu Dinas Pertanian Kota Semarang dan Kelurahan Sampangan. Dinas Pertanian Kota Semarang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan pangan dan pertanian, yang mana *urban farming* merupakan bagian dari urusan pertanian. Pada pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Dinas Pertanian terlibat dalam melaksanakan *urban farming*, memfasilitasi pengelolaan *urban farming*, dan memonitoring dan evaluasi kegiatan. Pada keterlibatan Dinas Pertanian dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan didukung dengan regulasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang. Keterlibatan dinas juga didukung sumber daya manusia melalui PPL yang melaksanakan dan memonitoring kegiatan, serta anggaran dan sarana prasarana untuk memfasilitasi pengelolaan *urban farming*.

Stakeholder pemerintah selanjutnya

adalah Kelurahan Sampangan. Kelurahan Sampangan terlibat dalam monitoring dan evaluasi kegiatan dengan mengkoordinasikan PKK, RW, dan KWT Puspitasari untuk memonitoring kendala maupun kebutuhan pengelolaan *urban farming* di masyarakat yang dikoordinasikan langsung dengan Dinas Pertanian Kota Semarang. Kelurahan Sampangan dalam pengelolaan *urban farming* juga terlibat dalam memfasilitasi kegiatan menggunakan anggaran pemberdayaan ekonomi untuk sosialisasi keamanan pangan.

2) **Bisnis (Business)**

Stakeholder bisnis yang terlibat dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan adalah PT. BRI Regional Office Kota Semarang. PT. BRI RO Kota Semarang mempunyai dua fungsi memberikan kebermanfaatn bagi lingkungan sekitar. PT. BRI RO Kota Semarang sebagai *stakeholder* bisnis terlibat dengan memberikan fasilitasi melalui *Corporate Social Responsibility* berupa sarana prasarana *urban farming*.

3) **Masyarakat (Community)**

Stakeholder masyarakat pertama yang terlibat dalam penelitian ini adalah KWT Puspitasari. KWT sebagai Kelompok tani resmi binaan Dinas Pertanian berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Nomor 8241/520/XII/2021. KWT mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan dan

mengembangkan *urban farming*. Pada keterlibatan KWT dalam pengelolaan *urban farming* dengan melaksanakan proses *urban farming*, dan mengatur sumber daya manusia dan material hasil dan produk olahan *urban farming*. KWT Puspitasari juga terlibat dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam *urban farming* melalui penyelenggaraan pelatihan terkait *urban farming* di masyarakat. *Stakeholder* masyarakat kedua yang terlibat pada penelitian ini adalah PKK RW 03 Kelurahan Sampangan. PKK RW terlibat dalam menggerakkan ibu-ibu untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan. *Stakeholder* masyarakat ketiga yang terlibat dalam pada penelitian ini adalah RW 03 Kelurahan Sampangan. Keterlibatan RW untuk menjalankan fungsinya dalam menindaklanjuti setiap usulan yang diberikan oleh masyarakat untuk memberikan kelancaran aktivitas masyarakat termasuk usulan KWT dalam menyediakan lahan *urban farming*. RW terlibat dalam menyediakan lahan fasilitas umum milik masyarakat RW untuk lahan bersama *urban farming*, serta mengolah dan membangun sarana prasarana pada lahan *urban farming*.

4) **Akademisi (*Academy*)**

Akademisi yang terlibat pada penelitian ini

adalah Universitas Negeri Semarang program studi Pendidikan Geografi. Keterlibatan UNNES sebagai wujud pengamalan tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat oleh UNNES merupakan bentuk penerapan ilmu pengetahuan di masyarakat berkaitan bidang ilmu geografi yaitu pembuatan humus dan pupuk cair.

5) **Media Massa (*Mass Media*)**

Stakeholder media massa yang terlibat dalam penelitian ini adalah Jawapos Radar Semarang. Radar Semarang mempunyai fungsi informasi, edukasi dan hiburan. Keterlibatan media massa pada pengelolaan *urban farming* melaksanakan fungsi informasi yaitu memperkenalkan informasi terdapatnya gerakan *urban farming*, serta fungsi edukasi adalah memberikan pengetahuan *urban farming* kepada masyarakat.

B. Peran *Stakeholders* dalam Pengelolaan Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*) di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang

1. ***Policy Creator***

Stakeholder yang memiliki peran *policy creator* dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan adalah Dinas Pertanian Kota Semarang. Dinas Pertanian Kota Semarang merumuskan dan menetapkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan

Pertanian Perkotaan dengan melibatkan Penyuluh Pertanian Lapangan. Dinas Pertanian yang memiliki peran *policy creator*, karena memiliki tugas pokok dan fungsi untuk merumuskan kebijakan dan merumuskan rencana strategis pada urusan pertanian.

Pada perumusan kebijakan, Dinas Pertanian melakukan identifikasi masalah-masalah pertanian yang terjadi di Kota Semarang. Dinas Pertanian Kota Semarang selanjutnya menilai lebih lanjut konteks masalah dengan melibatkan Penyuluh Pertanian Lapangan setiap Kecamatan untuk memberikan data keadaan dan masalah pertanian di wilayahnya, serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan. Dinas Pertanian kemudian mempertimbangkan alternatif kebijakan dalam menetapkan kebijakan. Pertimbangan utama alternatif kebijakan *urban farming* adalah menciptakan aktivitas pertanian di lingkungan perkotaan yang dilakukan oleh masyarakat, serta pertimbangan pendukung yaitu mengoptimalkan lahan tidak produktif.

Berdasarkan analisis peran diketahui bahwa Dinas Pertanian Kota Semarang merupakan *stakeholder* utama yang memiliki peran *policy creator* karena mempunyai wewenang, tugas pokok dan fungsi untuk perencanaan program dan kegiatan pertanian. Pelaksanaan peran *policy*

creator pada penelitian ini telah berjalan baik yang pembuatan kebijakan dilakukan *top down* melibatkan PPL kecamatan.



Gambar 1.1 Diagram *Policy Creator*

Sumber: Peneliti (2024)

2. Koordinator

Pada pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, *stakeholder* yang memiliki peran koordinator adalah Dinas Pertanian Kota Semarang, Kelurahan Sampangan, dan KWT Puspitasari. Dinas Pertanian Kota Semarang melaksanakan koordinasi dengan Kelompok Wanita Tani Puspitasari dengan *forum group discussion*. Dinas Pertanian melalui pegawai bidang hortikultura dan penyuluhan serta PPL Gajahmungkur melakukan koordinasi secara langsung dengan pertemuan rutin dua hingga tiga kali dalam sebulan untuk membahas metode, pelaksanaan tugas, kendala, serta strategi peningkatan *urban farming*. Koordinasi tidak langsung juga dilakukan oleh PPL Gajahmungkur dengan KWT Puspitasari melalui media *whatsapp*.

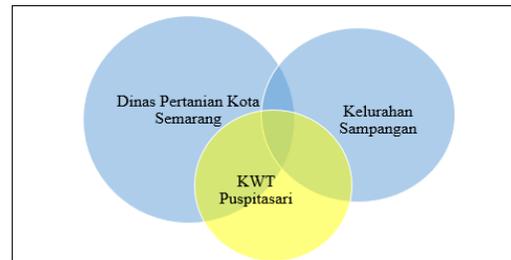
Kelurahan Sampangan melakukan peran koordinator dengan mengkoordinasikan KWT Puspitasari, PKK, dan RW melalui rapat kelembagaan rutin kelurahan yang dilakukan setiap dua bulan sekali untuk

memonitoring pelaksanaan peran *stakeholders* masyarakat. Kelurahan Sampangan juga melakukan koordinasi dengan KWT Puspitasari dalam forum musrenbang kelurahan untuk membahas kendala dan kebutuhan pengelolaan *urban farming* sehingga menjadi bahan masukan rencana kegiatan kelurahan dan akan dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Kota Semarang melalui PPL Gajahmungkur.

KWT Puspitasari melaksanakan koordinasi dengan PKK dan RW. KWT memberikan arahan PKK untuk mengajak ibu-ibu wilayah RW terlibat dalam pelaksanaan *urban farming*. KWT Puspitasari melakukan koordinasi dengan RW untuk kebutuhan administrasi pengelolaan *urban farming*, serta mengkoordinasikan RW yang mencakup masyarakat RW untuk terlibat dalam pemanfaatan hasil *urban farming*.

Berdasarkan analisis peran, *stakeholder* yang memiliki peran koordinator paling besar dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanian Kota Semarang. Dinas Pertanian memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan seluruh *stakeholder* dalam pengelolaan *urban farming* secara umum dalam lingkup Kota Semarang. Pada peran koordinator masih belum optimal sebab masih terdapat masalah koordinasi antara Dinas Pertanian melalui PPL Gajahmungkur dengan KWT

Puspitasari terkait kesalahan penafsiran instruksi tugas.



Gambar 1.2 Diagram Koordinator

Sumber: Peneliti (2024)

3. Fasilitator

Stakeholder yang mempunyai peran fasilitator dalam penelitian ini antara lain Dinas Pertanian Kota Semarang, Kelurahan Sampangan, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Regional Office Kota Semarang, Kelompok Wanita Tani (KWT) Puspitasari, dan RW 03 Kelurahan Sampangan. Dinas Pertanian Kota Semarang memberikan fasilitasi fisik berupa bibit, benih, dan sarana produksi yang mencakup pupuk, pestisida, dan polybag. Dinas Pertanian Kota Semarang juga memberikan fasilitasi non fisik yaitu pelatihan agribisnis pertanian di lahan sempit dan pelatihan olahan pangan hasil *urban farming*.

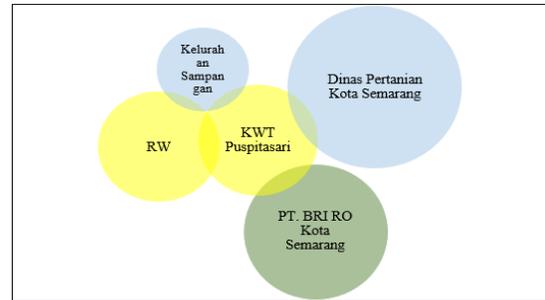
Kelurahan Sampangan memfasilitasi pengelolaan *urban farming* melalui sosialisasi keamanan pangan. Kelurahan Sampangan juga memberikan pembelajaran *urban farming* bagi anak PAUD-SMA dalam kegiatan kampung ramah anak.

PT. Bank BRI Regional Office memberikan fasilitasi dengan *Corporate*

Social Responsibility sebanyak dua kali. CSR pertama berupa greenhouse dan alat penataan tanam konvensional, dan CSR Kedua berupa bahan kimia pembasmi hama, kipas angin, kursi, keramik, dan payung. KWT Puspitasari memfasilitasi bibit yaitu bibit tomat, cabe, dan terong untuk masyarakat. Pemberian bibit tanaman oleh KWT Puspitasari kepada masyarakat di lingkungan Kelurahan Sampangan supaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam *urban farming* yang dilakukan secara mandiri.

RW 03 Kelurahan Sampangan memfasilitasi pengelolaan *urban farming* dengan menyediakan lahan fasilitas umum milik masyarakat RW untuk lahan bersama *urban farming*. RW 03 Kelurahan Sampangan juga mengolah lahan dengan membersihkan lahan dan mengganti tanah pertanian, serta membangun sarana prasarana pada lahan *urban farming* yang dibantu oleh RT antara lain: instalasi air, sumur, instalasi listrik.

Stakeholders yang memiliki peran fasilitator dengan peran paling besar pada penelitian ini adalah Dinas Pertanian Kota Semarang, sebab memberikan fasilitasi secara tetap dan terjadwal. Pada pelaksanaan peran fasilitator telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat hambatan dalam konsistensi masyarakat namun hambatan tersebut tidak berasal fasilitator.



Gambar 1.3 Diagram Fasilitator

Sumber: Peneliti (2024)

4. Implementor

Stakeholder yang mempunyai peran implementor dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanian Kota Semarang, Kelompok Wanita Tani (KWT) Puspitasari, PKK RW 03 Kelurahan Sampangan, dan RW 03 Kelurahan Sampangan. Dinas Pertanian Kota Semarang menjalankan tugasnya melalui pemberian sosialisasi gerakan *urban farming* dan bimbingan teknis kepada pelaksana *urban farming*. Dinas Pertanian melalui PPL Gajahmungkur melakukan pendampingan dan penyuluhan pertanian perkotaan kepada masyarakat di Kelurahan Sampangan. Pendampingan dan penyuluhan merupakan bentuk monitoring pengelolaan *urban farming* yang dilaksanakan dua hingga tiga kali setiap bulan. Penyuluhan oleh PPL Gajahmungkur dengan mentransformasikan pengetahuan pertanian perkotaan kepada masyarakat.

KWT Puspitasari melaksanakan proses *urban farming* di Kelurahan Sampangan yaitu pembibitan, penanaman, perawatan, panen. Penanaman oleh KWT Puspitasari

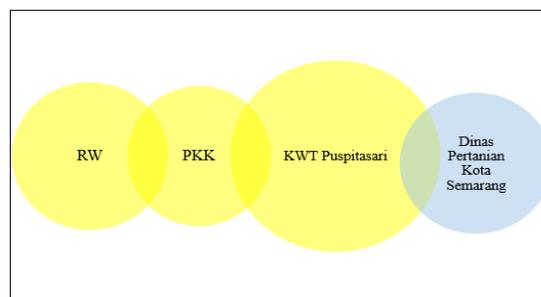
dibagi dua jenis yaitu hidroponik dan penanaman tanah. Jenis yang sering ditanam oleh KWT adalah jenis bayam, kangkung hidroponik, dan selada hidroponik. KWT Puspitasari juga mengelola kelembagaan KWT dengan mengatur sumber daya manusia dan sumber daya material yang berupa hasil dari *urban farming* dan dana organisasi. Hasil dari *urban farming* akan langsung dilakukan penjualan maupun diolah oleh KWT menjadi produk *urban farming*.

PKK RW 03 Kelurahan Sampangan melaksanakan edukasi *urban farming* pada kegiatan PKK untuk menggerakkan ibu-ibu bergabung pada keanggotaan KWT Puspitasari, berpartisipasi dalam pemanfaatan hasil *urban farming*, pelatihan dan lomba kampung *urban farming*. PKK dalam pengelolaan *urban farming* juga memberikan usulan pengelolaan seperti jenis dan komoditas produk *urban farming*.

Peran implementor selanjutnya oleh RW 03 Kelurahan Sampangan yang melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan dan pengecekan sarana prasarana di lahan *urban farming*. RW memberikan masukan penyelesaian masalah pada KWT Puspitasari dalam pengelolaan *urban farming*.

Stakeholder yang mempunyai peran implementor dengan peran paling besar pada penelitian ini yaitu KWT Puspitasari

karena menjadi pelaksana proses *urban farming* di Kelurahan Sampangan. Peran implementor dalam pengelolaan *urban farming* masih belum berjalan optimal. Pada peran implementor Dinas Pertanian Kota Semarang terjadi kekurangan jumlah tenaga PPL Kecamatan. KWT Puspitasari mengalami masalah pada perbedaan komitmen anggota dalam menjalankan tugas karena kesalahpahaman *mindset* pekerjaan sosial yang dianggap tidak mengikat. Pada PKK RW 03 Kelurahan Sampangan dalam memberikan pemahaman edukasi *urban farming* masih kurang merangkul masyarakat sehingga partisipasi wanita usia muda kurang.



Gambar 1.4 Diagram Implementor

Sumber: Peneliti (2024)

5. Akselerator

Stakeholder yang mempunyai peran akselerator pada penelitian ini adalah Kelompok Wanita Tani (KWT) Puspitasari, Universitas Negeri Semarang, dan Jawapos Radar Semarang. KWT Puspitasari dalam menunjang percepatan pengelolaan *urban farming* dengan memberikan pelatihan untuk lingkup masyarakat Kelurahan Sampangan dan RW berupa budidaya kangkung;

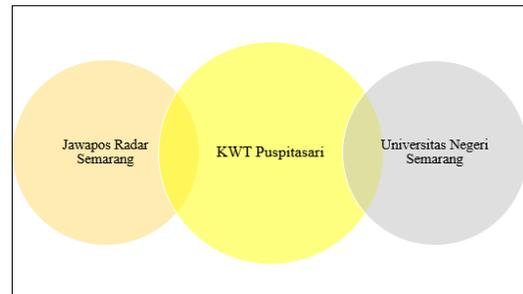
pelatihan budidaya terong, tomat, cabe; pelatihan pembuatan pupuk organik; pelatihan hidroponik, pelatihan budidaya pertanian tanaman pekarangan; Pelatihan olahan hasil *urban farming* oleh KWT; dan pelatihan membuat sabun mandi dari buah atau sayur.

Universitas Negeri Semarang Program Studi Pendidikan Geografi melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wujud pengamalan tri dharma perguruan tinggi berupa pelatihan pembuatan humus atau kompos, pelatihan pembuatan pupuk cair, dan manajemen pembukuan.

Jawapos Radar Semarang mempercepat pencapaian sasaran pengelolaan *urban farming* dengan meliputi dan mempublikasikan kegiatan *urban farming* pada media cetak dan online milik Radar Semarang. Radar Semarang juga menyelenggarakan lomba kampung hebat kategori kampung *urban farming*. Lomba tersebut sebagai ide atau inovasi dalam pengelolaan *urban farming*.

Stakeholder yang mempunyai peran akselerator paling besar pada penelitian ini adalah KWT Puspitasari, yang peranannya bersama dengan bantuan dan partisipasi masyarakat sebab keberhasilan pencapaian sasaran pengelolaan sangat bergantung dari pelaksana *urban farming* di masyarakat. Pada peran akselerator masih belum optimal pada peran Jawapos Radar

Semarang. Liputan dan publikasi *urban farming* oleh Radar Semarang tidak dilakukan secara rutin serta belum menjangkau pada informasi penjualan hasil dan produk *urban farming*.



Gambar 1.5 Diagram Akselerator

Sumber: Peneliti (2024)

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan *Stakeholders* dalam Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*) di Kelurahan Sampangan

1. Faktor Pendukung

a) Profesionalitas Penyuluh Pertanian Lapangan.

PPL sebagai tenaga penggerak Dinas Pertanian menjalankan tugas secara profesional dalam mendampingi dan memberikan penyuluhan pertanian. PPL memberikan solusi atas kendala *urban farming*, serta memberikan strategi peningkatan *urban farming* melalui bimbingan komoditi unggulan sehingga mendukung pencapaian sasaran dan produktivitas *urban farming*.

b) Semangat Tinggi Kelompok Wanita Tani (KWT) Puspitasari.

KWT Puspitasari mempunyai semangat yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan *urban farming* melalui pelatihan Dinas Pertanian, Penyuluhan rutin oleh PPL Kecamatan Gajahmungkur, mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat dari Universitas Negeri Semarang, dan studi banding pada agrowisata.

c) Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan tinggi dilihat dari pemberian kontribusi atau fasilitasi masyarakat berupa lahan dan sarana prasarana lahan *urban farming*, serta masyarakat yang menjadi implementor pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan.

d) Kebijakan yang Mendukung Keterlibatan *Stakeholder* Lain

Kebijakan terkait *urban farming* yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang. Pada kebijakan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan *urban farming* dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang serta mendorong keterlibatan *stakeholder* lain yaitu masyarakat umum, dan non pemerintah untuk berperan serta pada pengelolaan *urban farming*.

2. Faktor Penghambat

a) Komunikasi yang Belum Terjalin dengan Baik

Koordinasi yang dilakukan oleh PPL Gajahmungkur terhadap KWT Puspitasari mengalami masalah komunikasi yaitu kesalahan penafsiran informasi instruksi tugas persiapan kegiatan *urban farming*. Masalah komunikasi tersebut menimbulkan ketidaksinergisan maksud dan tugas yang dilaksanakan. Masalah komunikasi juga terjadi pada internal KWT Puspitasari karena perbedaan komitmen pekerjaan anggota berkaitan dengan kesalahpahaman *mindset* tugas organisasi sosial yang tidak mengikat sehingga terdapat anggota yang tidak melaksanakan tugas karena mengutamakan kepentingan pribadi.

b) Terbatasnya Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan

Jumlah PPL Kecamatan Gajahmungkur hanya terdapat satu orang dengan ruang lingkup kerja yang luas. Tenaga Penyuluh Pertanian yang kurang dengan ruang lingkup kerja yang luas membuat terbatasnya pendampingan dan penyuluhan. Kondisi tersebut membuat kurang optimalnya proses *urban farming*.

c) Kurangnya Partisipasi Wanita Muda

Partisipasi wanita yang terlibat dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan didominasi wanita usia

pertengahan dan lansia (*elderly*) dengan umur berkisar 45 hingga 70 tahun. Partisipasi wanita usia muda dalam hal ini adalah <45 atau *range* remaja akhir dan dewasa akhir yaitu 17-45 Tahun masih kurang. PKK dan KWT sendiri telah mendorong partisipasi wanita dengan melakukan edukasi pelatihan *urban farming*, namun partisipasi wanita usia muda masih kurang.

d) Keterlibatan Media Massa yang Belum Mempublikasikan Hasil dan Produk *Urban Farming*

Media massa dalam hal ini Radar Semarang pada pengelolaan *urban farming* hanya meliput dan mempublikasikan pada kegiatan tertentu, yang belum mempublikasikan informasi penjualan hasil dan produk *urban farming* di Kelurahan Sampangan. Peran media massa yang belum optimal membuat informasi terkait dengan penjualan hasil dan produk *urban farming* belum diketahui oleh masyarakat luas dan penjualannya masih terbatas pada masyarakat sekitar Kelurahan Sampangan.

KESIMPULAN

Stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan mencakup unsur pemerintah yaitu Dinas Pertanian Kota Semarang dan Kelurahan Sampangan yang melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitoring dan

evaluasi kegiatan. *Stakeholder* bisnis yaitu PT. Bank BRI Regional Office Kota Semarang yang memberikan pendanaan melalui CSR. *Stakeholders* masyarakat adalah KWT Puspitasari, PKK RW, dan RW 03 Kelurahan Sampangan yang melaksanakan *urban farming*. *Stakeholder* akademisi adalah Universitas Negeri Semarang yang mengamalkan tri dharma perguruan tinggi. *Stakeholder* media massa adalah Jawapos Radar Semarang yang memberikan informasi dan edukasi mengenai *urban farming*. Peran *stakeholders* dalam pengelolaan *urban farming* dianalisis dari lima peran yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, akselerator. Peran *stakeholders* yang masih mengalami masalah adalah peran koordinator, implementor, dan akselerator.

Adapun faktor pendukung pada penelitian ini adalah profesionalitas tenaga penyuluh pertanian lapangan, semangat tinggi KWT Puspitasari, kepercayaan masyarakat, dan kebijakan yang mendukung keterlibatan *stakeholders* lain. Faktor penghambat pada penelitian ini adalah komunikasi yang belum terjalin dengan baik, terbatasnya jumlah penyuluh pertanian lapangan kecamatan, kurangnya partisipasi wanita usia muda, serta keterlibatan media massa yang belum mempublikasikan hasil dan produk *urban farming*.

SARAN

Terdapat beberapa saran yang diajukan oleh peneliti diantaranya antara lain:

- 1) Setiap *stakeholders* terutama *stakeholders* yang memiliki peran koordinator perlu meningkatkan intensitas komunikasi agar tidak terjadi kesalahan penafsiran informasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- 2) Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai *leading sector* dalam pengelolaan *urban farming* perlu menambah jumlah tenaga PPL Kecamatan agar meningkatkan pendampingan dan penyuluhan.
- 3) PKK RW 03 Kelurahan Sampangan lebih mengajak dan merangkul wanita usia muda, untuk berpartisipasi dalam pengelolaan *urban farming*.
- 4) KWT Puspitasari perlu meningkatkan kerjasama dengan media massa Radar Semarang untuk mempublikasikan informasi penjualan hasil dan produk *urban farming*.
- 5) Mengoptimalkan pemenuhan fasilitas yang dilakukan oleh fasilitator dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan untuk meningkatkan produktivitas hasil *urban farming*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan rasa hormat dan terima kasih tidak terhingga kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan

artikel jurnal penelitian ini kepada:

1. Segenap dosen S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
2. Bapak Amni Zarkasyi Rahman S.AP, M.Si dan Ibu Retna Hanani, S.Sos, MPP selaku dosen pembimbing.
3. Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si selaku ketua dosen penguji.
4. Serta dari pihak-pihak yang memberikan dukungan moral dan finansial sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Freeman, R. Edward. (1984). *Strategic Management a Stakeholder Approach*. University of Minnesota
- Jim Ife dan Frank Tesoriero. 2016. *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Keban, T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Gavamedia
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho. (2014). *Public Policy. Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo
- Wijaya, A.F., & Danar, O.R. (2014). *Manajemen Publik Teori dan Praktik*. Malang: UB Press

Jurnal

- Dewi, M. R., Nurfani, H. D., Aisyah Borneo, A. N., & Arung, R. (2020). Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Agropolitan Kabupaten Kutai Kartanegara. *SPECTA Journal of Technology*, 4(1), 35–40. <https://doi.org/10.35718/specta.v4i1.156>
- Fauzi, R., Ichniarsyah, N., & Agustin, H. (2016). Pertanian Perkotaan: Urgensi, Peranan, dan Praktik Terbaik. *Jurnal Agroteknologi*, 10(1), 40-45
- Fridayanti Lumintang, Juliana Lesawengen, L. (2023). Peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar “Senja Cerah.” *Jurnal Ilmiah*
- Handayani, F., Warsono, H. (2017). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karangjahe di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review* 6(3). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i3.16543>
- Maulana, R. A., Warsono, H., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Urban Farming: Program Pemanfaatan Lingkungan Untuk Pengembangan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang. *Perspektif*, 11(4), 1329–1335. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.6302>
- Nugroho, Hermawan cahyo et al. 2014. Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pembangunan dan Lestari Alam*, 5 (2).
- Yestisia, I. (2022). Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Partisipasi Anggota Dalam Kegiatan Urban Farming Pada Kelompok Tani Dahlia. *Jurnal Agribisnis*, 4(2).
- Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang Dinas Pertanian Kota Semarang. (2022). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kota Semarang 2022. Kota Semarang: Dinas Pertanian Kota Semarang
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2023). Kota Semarang Dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kota Semarang (bps.go.id)
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2021). Kecamatan Gajahmungkur Dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Kota Semarang (bps.go.id)
- Agus. (2023). KWT Puspitasari Sampangan Ubah Lahan Buangan Jadi Urban Farming (Radar Semarang). Diakses pada 02/03/2023
- Santoso, Eko. (2020). Kampanyekan Urban Farming, Dinas Pertanian Kota Semarang Distribusikan Bibit (Times Indonesia). Diakses pada 02/01/2023
- Tim KKN Sampangan. (2021). Mengelilingi Sampangan (Kompasiana.id). Diakses pada 28/12/2021
- Yunita, Dina. (2023). Permintaan Benih Meningkatkan Seiring Berjalannya Urban Farming (Rmol JawaTengah) Diakses pada 15/03/2023

Peraturan Perundang-undangan dan Sumber Lain

- Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan,